KENDARI EKSPRES SELASA, 18 September 2012

Temuan BPK, Negara Dirugikan Rp 1 M di Konut

WANGGUDU, KE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Utara (Konut) merekomendasikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditindaklanjuti eksekutif.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan, terdapat sejumlah dinas yang mana pengelolaan keuangan yang dipungut dari pendapatan asli daerah (PAD) belum dilaksanakan secara maksimal.

Disinyalir, adan oknum pemungut liar PAD. Pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah menyasar ke kantong pribadi. Dinas tersebut yakni Dinas perhubungan dan Dinas Pertambangan. Akibat adanya oknum ini, negara dirugikan kurang lebih Rp 1 miliar.

"Terhadap hasil temuan ini, dewan merekomendasikan eksekutif untuk mengambil langkah yang tegas. Juga, memberikan sanksi kepada beberapa SKPD yang tidak disiplin ini," ungkap juru bicara Fraksi Madani, saat sidang paripurna dengan agenda pemandangan akhir fraksi, Senin (17/9).

Fraksi Madani juga merekomendasikan, agar eksekutif menindak tegas pemberian panjar terhadap bendahara umum daerah (BUD), melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang tidak becus, dan menyusun daftar aset, serta uraian aset baik jenis maupun jumlahnya.

Berikutnya, tentang adanya keberadaan uang tersebut.

"Jika dalam jangka waktu dua bulan rekomendasi ini tidak diindahkan, dewan melalui ketua akan mengambil alih dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk diproses," katanya. **(m1/b/iis)**